

Pengaruh *Smart Government* Dan Budaya Organisasi Terhadap Rekonstruksi Birokrasi Di Kota Tangerang Selatan

The Influence Of Smart Government And Organizational Culture On Bureaucracy Reconstruction In South Tangerang City

Arvi Budi Fitri Ramadanti^{a*}, Faria Ruhana^b, Megandaru Widhi Kawuryan^c
Sekolah Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia^{a,b,c}
^aarvibudi@gmail.com

Abstract

Bureaucratic reconstruction is a strategic agenda in realizing governance that is effective, responsive, transparent, and adaptive to technological developments and the dynamics of community needs. In the context of local government, the implementation of smart government and strengthening organizational culture are seen as two key factors that can encourage more substantive bureaucratic transformation. This study aims to analyze the influence of smart government and organizational culture on bureaucratic reconstruction in South Tangerang City. The study used a quantitative approach with a survey method of 96 respondents from various regional apparatus. Data collection was carried out through questionnaires, while data analysis used multiple linear regression with the help of SPSS version 30. Prior to hypothesis testing, the data had gone through validity, reliability, and classical assumption tests which included normality, linearity, multicollinearity, and heteroscedasticity. The results showed that partially smart government had a significant effect on bureaucratic reconstruction ($p=0.021$), while organizational culture had a very significant and dominant effect ($p=0.000$). Simultaneously, the two factors also had a significant effect ($p=0.001$). An Adjusted R^2 value of 0.762 indicates that 76.2% of the variation in bureaucratic reconstruction can be explained by the model, while the rest is influenced by other factors outside the study.

Keywords: *Smart Government, Organizational Culture, Bureaucratic Reconstruction, Bureaucratic Reform, Local Government.*

Abstrak

Rekonstruksi birokrasi merupakan agenda strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan *smart government* dan penguatan budaya organisasi dipandang sebagai dua faktor kunci yang dapat mendorong transformasi birokrasi secara lebih substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *smart government* dan budaya organisasi terhadap rekonstruksi birokrasi di Kota Tangerang Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 96 responden yang berasal dari berbagai perangkat daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 30. Sebelum pengujian hipotesis, data telah melalui uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, linearitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *smart government* berpengaruh signifikan terhadap rekonstruksi birokrasi ($p=0,021$), sementara budaya organisasi berpengaruh sangat signifikan dan dominan ($p=0,000$). Secara simultan, kedua faktor tersebut juga berpengaruh signifikan ($p=0,001$). Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,762 menunjukkan bahwa 76,2% variasi rekonstruksi birokrasi dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.

Kata kunci: *Smart Government, Budaya Organisasi, Rekonstruksi Birokrasi, Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah.*

1. Pendahuluan

Pada era digital ini, penerapan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor, termasuk tata kelola kota. Kota-kota yang cerdas (*Smart City*) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi

yang terintegrasi. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan perkotaan, seperti kemacetan, polusi, peningkatan permintaan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, konsep *Smart City* muncul sebagai solusi potensial untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Salah satu komponen dalam *Smart City* adalah *Smart Government*.

Konsep *Smart Government* telah menjadi fokus utama bagi banyak pemerintah kota di seluruh dunia. Di tengah perubahan global yang cepat dan permintaan masyarakat akan layanan yang lebih efisien, konsep ini menjanjikan integrasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. *Smart City* sendiri adalah sebuah konsep tatanan kota cerdas berbasis pelayanan, bersifat transparan dan berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Dalam hal ini, *Smart Government* sebagai komponen dari *Smart City* memberikan pelayanan publik yang mudah di akses tanpa adanya batas tempat lokasi dan waktu. Dengan berkembangnya media dan teknologi, sebagai Kota yang bertumbuhnya semakin tinggi membutuhkan sistem perkotaan yang mampu menyediakan Pelayanan Publik dengan baik, untuk itu di era modern seperti sekarang yang serba digital ini kemampuan pengawasan dari pihak Pemerintah Kota sangatlah penting dan perlu di kembangkan, dengan adanya pengawasan kota secara berkala maka mampu memecahkan masalah secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut, berkaitan dengan *Smart Government*, terdapat gap teoritis yang penting antara konsep *Smart Government* dan Rekonstruksi Birokrasi. Literatur mengenai *Smart Government* banyak membahas aspek teknologi dan inovasi digital, sementara rekonstruksi birokrasi lebih berfokus pada aspek kelembagaan, perubahan struktural, serta dinamika internal organisasi pemerintahan. Keterkaitan antara keduanya belum banyak dijelaskan secara komprehensif: bagaimana penerapan prinsip dan teknologi dalam *Smart Government* secara konkret mendorong atau mempercepat proses rekonstruksi birokrasi masih menjadi pertanyaan yang belum banyak terjawab dalam kajian ilmiah.

Transformasi birokrasi menjadi agenda utama dalam reformasi sektor publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Reformasi birokrasi tidak lagi dimaknai sekadar perubahan struktural atau administratif, tetapi telah bergeser ke arah **rekonstruksi birokrasi yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis teknologi**. Dalam konteks ini, digitalisasi pemerintahan melalui pendekatan *smart government* menjadi salah satu strategi utama yang diharapkan mampu mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.

Penerapan *Smart Government* di Kota Tangerang Selatan dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai aplikasi digital yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Aplikasi-aplikasi ini mencakup berbagai aspek administratif, mulai dari presensi pegawai, manajemen jaringan telekomunikasi, hingga sistem pelaporan kinerja pegawai. Beberapa aplikasi yang telah dikembangkan dan diterapkan di Kota Tangerang Selatan antara lain *Ontime Based Online*, SIMANJAT, SINANI, Pelangi, LMS, dan berbagai aplikasi lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi kerja pegawai dan memperbaiki transparansi dalam pelaporan serta pengelolaan anggaran. Meskipun demikian, implementasi *Smart Government* ini tidak lepas dari sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama terkait dengan minimnya

fungsi aplikasi pendukung, kesulitan integrasi antar-dinas, dan masalah keamanan data.

Selain aplikasi-aplikasi tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga mengembangkan *Learning Management System* (LMS) untuk penyelenggaraan diklat (pendidikan dan pelatihan) secara daring bagi ASN. LMS BKPP ini memungkinkan peserta diklat untuk mengikuti pelatihan secara online, yang semakin relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan belajar jarak jauh. Aplikasi *e-Dalev*, yang digunakan untuk melaporkan progress kegiatan anggaran per triwulan, juga telah membantu Bappeda dalam memantau dan mengelola realisasi anggaran serta memprediksi sisa anggaran (silpa). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya diterapkan untuk meningkatkan kinerja individu pegawai, tetapi juga untuk memperbaiki manajemen anggaran dan perencanaan pembangunan daerah.

Meskipun aplikasi seperti *Ontime Based Online* yang dirancang untuk mendata kehadiran pegawai dan aktivitas harian sudah ada, kenyataannya aplikasi ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pegawai. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana aplikasi tersebut dapat meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan implementasi *Smart Government*, tetapi juga dibutuhkan kesiapan dan pemahaman dari para penggunanya seperti dalam hal ini para ASN agar teknologi dapat digunakan dengan optimal.

Smart City adalah sebuah konsep kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi operasional, berbagi informasi dengan publik, dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah serta kesejahteraan warganya. Konsep ini mencakup berbagai elemen seperti infrastruktur fisik, teknologi digital, data, dan pengguna manusia yang terintegrasi untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien dan responsif.

Menurut Giffinger et al. (2007), *Smart City* memiliki enam dimensi utama: ekonomi pintar, mobilitas pintar, lingkungan pintar, masyarakat pintar, kehidupan pintar, dan pemerintahan pintar. Masing-masing dimensi ini berfokus pada penggunaan teknologi dan data untuk meningkatkan kualitas hidup di kota tersebut. Konsep Kota Pintar (*Smart City*) menjadi salah satu poin menarik dan sangat penting mengingat dengan tata kelola pemerintahan yang baik maka diharapkan dapat memberikan banyak manfaat terutama memberikan manfaat bagi masyarakat. Birokrasi yang berbelit, pelayanan yang kurang prima serta banyaknya isu KKN seharusnya dapat teratasi dengan konsep *Smart Government* yang dengan adopsi teknologi informasi maka dapat memangkas proses birokrasi serta meningkatkan transparansi.

Smart Government atau tata kelola cerdas merupakan konsep yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan praktik tata kelola untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Konsep ini menjadi semakin penting dalam era digital saat ini, di mana teknologi memainkan peran kunci dalam menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Menurut Gil-Garcia, Helbig, dan Ojo (2014), *Smart Government* adalah: penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan meningkatkan proses pemerintahan, termasuk pengambilan keputusan, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Mereka menekankan bahwa *Smart Government* tidak hanya

tentang penerapan teknologi tetapi juga tentang inovasi dalam proses dan struktur pemerintahan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Menurut Gil-Garcia et al. (2014), *Smart Government* merupakan: *the integration of advanced information technologies into governmental processes to improve the quality of services provided to citizens, to increase the efficiency of internal operations, and to foster greater participation and collaboration in governance*".

2. Metode

Desain penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah desain kuantitatif dengan metode survei. Penelitian kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai pengaruh *Smart Government* dan Budaya Organisasi terhadap Rekonstruksi Birokrasi di Kota Tangerang Selatan. Desain penelitian kuantitatif mencakup survei dan eksperimen. Desain survei memberikan deskripsi numerik mengenai tren, sikap, dan opini populasi dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut. Penelitian eksperimen secara sistematis memanipulasi satu atau lebih variabel untuk mengevaluasi bagaimana manipulasi ini mempengaruhi hasil yang diinginkan, dengan tujuan untuk menentukan hubungan sebab-akibat (Creswel, 2023)

Dalam konteks penelitian ini, metode metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang relevan, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengenai implementasi *Smart Government* serta dan Budaya Organisasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Selain itu, pemilihan desain penelitian kuantitatif dengan metode survei didukung oleh keunggulannya dalam hal efisiensi biaya dan waktu. Menurut Creswell (2023), metode survei memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari banyak responden dalam waktu yang relatif singkat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode kualitatif.

Secara keseluruhan, desain penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengoptimalkan implementasi *Smart Government* dan Budaya Organisasi di Kota Tangerang Selatan, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan Budaya Birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Pendapat ahli mengenai desain penelitian kuantitatif dengan metode survei menyatakan bahwa metode ini efektif dalam mengumpulkan data dari sampel yang besar dan heterogen. Cooper dan Schindler (2014) menyatakan bahwa survei deskriptif merupakan metode yang kuat dalam mengukur dan menggambarkan berbagai aspek dari populasi besar, serta mampu memberikan hasil yang dapat digeneralisasikan. Penelitian yang menggunakan metode survei deskriptif juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis korelasional guna mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

3. Hasil Dan Pembahasan

Variabel *Smart Government* Berdasarkan Dimensi Penelitian

Implementasi *Smart Government* dalam penelitian ini diukur melalui lima dimensi utama, yaitu transparansi, partisipasi, kolaborasi, efisiensi, dan inklusivitas. Kelima dimensi tersebut merepresentasikan prinsip-prinsip utama tata kelola pemerintahan modern yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran empiris mengenai persepsi aparatur pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan terhadap tingkat implementasi *Smart Government* yang telah berjalan.

Tabel 4. 1. Statistik Deskriptif Variabel *Smart Government* Descriptive Statistics

| | N | Min | Max | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|------|------|--------|----------------|
| Transparansi | 96 | 3,67 | 5,00 | 4,2049 | 0,41428 |
| Partisipasi | 96 | 3,33 | 5,00 | 4,1736 | 0,41033 |
| Kolaborasi | 96 | 3,50 | 5,00 | 4,1771 | 0,45871 |
| Efisiensi | 96 | 3,33 | 5,00 | 4,3681 | 0,45494 |
| Inklusifitas | 96 | 3,67 | 5,00 | 4,2743 | 0,41884 |
| Valid N (listwise) | 96 | | | | |

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap 96 responden, seluruh dimensi *Smart Government* menunjukkan nilai rata-rata (mean) di atas 4,00 pada skala Likert 1–5. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum implementasi *Smart Government* di Kota Tangerang Selatan dinilai berada pada kategori tinggi. Selain itu, nilai standar deviasi pada seluruh dimensi relatif rendah, yaitu berkisar antara 0,41 hingga 0,46, yang menunjukkan bahwa persepsi responden cenderung homogen dan tidak menunjukkan perbedaan penilaian yang ekstrem. Dengan demikian, data ini mencerminkan adanya konsistensi pandangan aparatur pemerintah terhadap penerapan *Smart Government* di lingkungan birokrasi daerah.

Dimensi efisiensi memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 4,3681. Tingginya nilai pada dimensi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dinilai telah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi. Penggunaan sistem informasi, aplikasi layanan digital, serta integrasi proses kerja berbasis elektronik dipersepsikan mampu mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi prosedur administratif yang berbelit, serta meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konsep *Smart Government* yang menempatkan teknologi sebagai alat untuk merampingkan proses birokrasi dan meminimalkan inefisiensi struktural yang selama ini menjadi karakteristik birokrasi konvensional.

Selanjutnya, dimensi inklusivitas menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,2743, yang juga berada pada kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi *Smart Government* di Kota Tangerang Selatan dipersepsikan telah cukup memperhatikan prinsip keterjangkauan layanan bagi berbagai kelompok masyarakat. Aparatur menilai bahwa sistem pemerintahan berbasis digital yang dikembangkan relatif mampu menjangkau pengguna layanan dari latar belakang sosial yang beragam, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan publik. Meskipun demikian, tingginya nilai inklusivitas ini tetap perlu dipahami secara kritis, mengingat tantangan kesenjangan digital dan perbedaan tingkat literasi teknologi masih berpotensi membatasi akses sebagian kelompok masyarakat.

Dimensi transparansi memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,2049. Nilai ini menunjukkan bahwa responden menilai pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan

daerah telah berkontribusi positif terhadap keterbukaan informasi publik. Penggunaan website resmi pemerintah daerah, portal layanan publik, serta sistem informasi berbasis digital dipersepsikan mampu meningkatkan akses aparatur dan masyarakat terhadap informasi kebijakan, program, dan pelayanan. Transparansi yang didukung oleh teknologi ini berperan penting dalam membangun akuntabilitas birokrasi, mengurangi asimetri informasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, *Smart Government* tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, dimensi kolaborasi mencatat nilai rata-rata sebesar 4,1771. Nilai ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dinilai telah mendorong terjadinya koordinasi dan kerja sama yang lebih baik, baik antarunit kerja di lingkungan pemerintah daerah maupun antara pemerintah dengan aktor eksternal. Sistem digital memungkinkan pertukaran data dan informasi secara lebih cepat, serta mendukung integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Namun demikian, meskipun berada pada kategori tinggi, nilai kolaborasi ini masih berada di bawah efisiensi dan inklusivitas, yang mengindikasikan bahwa potensi *Smart Government* dalam memperkuat kolaborasi lintas aktor masih dapat ditingkatkan lebih lanjut.

Dimensi partisipasi memperoleh nilai rata-rata terendah dibandingkan dimensi lainnya, yaitu sebesar 4,1736, meskipun tetap berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi pemerintahan telah menyediakan berbagai kanal partisipasi, seperti pengaduan *online*, aplikasi layanan publik, dan media komunikasi digital, tingkat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan masih relatif lebih rendah dibandingkan aspek lainnya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa implementasi *Smart Government* di Kota Tangerang Selatan masih cenderung berfokus pada aspek internal birokrasi dan pelayanan administratif, sementara dimensi partisipatif belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana demokratisasi pemerintahan.

Variabel Budaya Organisasi

Variabel Budaya Organisasi dalam penelitian ini diukur melalui lima dimensi utama, yaitu inovasi dan perubahan, orientasi kinerja dan hasil, orientasi pelayanan publik, kerja sama dan kolaborasi, serta adaptasi terhadap teknologi. Pengukuran dilakukan terhadap 96 responden aparatur Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggunakan skala Likert 1–5. Hasil statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai persepsi responden terhadap kondisi budaya organisasi yang berkembang di lingkungan birokrasi pemerintah daerah.

Tabel 4. 2. Statistik Deskriptif Variabel Budaya Organisasi Descriptive Statistics

| | N | Min | Max | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------------|----|------|------|--------|----------------|
| Inovasi dan Perubahan | 96 | 3,50 | 5,00 | 4,2031 | 0,44472 |
| Orientasi Kinerja dan Hasil | 96 | 3,50 | 5,00 | 4,0938 | 0,46062 |
| Orientasi Pelayanan Publik | 96 | 3,50 | 5,00 | 4,2396 | 0,45294 |
| Kerjasama dan Kolaborasi | 96 | 3,50 | 5,00 | 4,3802 | 0,46873 |
| Adaptasi Teknologi | 96 | 3,50 | 5,00 | 4,3490 | 0,49799 |

Valid N (listwise)

96

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 30, secara umum nilai rata-rata (mean) seluruh dimensi budaya organisasi berada di atas angka 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang positif dan relatif tinggi terhadap budaya organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selain itu, nilai standar deviasi yang berada di bawah 0,50 mengindikasikan bahwa jawaban responden relatif homogen, sehingga persepsi terhadap budaya organisasi cenderung konsisten di antara responden.

Dimensi inovasi dan perubahan memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,2031, dengan nilai minimum 3,50 dan maksimum 5,00, serta standar deviasi sebesar 0,44472. Nilai ini menunjukkan bahwa aparatur Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara umum menilai organisasi telah mendorong adanya inovasi serta cukup terbuka terhadap perubahan. Budaya yang mendukung inovasi ini tercermin dari adanya upaya adaptasi terhadap kebijakan baru, penggunaan teknologi digital, serta pembaruan dalam prosedur kerja birokrasi. Meskipun demikian, nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa persepsi tersebut merata, namun masih terdapat ruang untuk memperkuat budaya inovasi agar tidak hanya bersifat normatif, melainkan benar-benar terinternalisasi dalam perilaku kerja aparatur.

Dimensi orientasi kinerja dan hasil memiliki nilai rata-rata paling rendah dibandingkan dimensi lainnya, yaitu sebesar 4,0938, dengan standar deviasi 0,46062. Meskipun masih berada dalam kategori tinggi, nilai ini mengindikasikan bahwa orientasi birokrasi terhadap pencapaian hasil dan kinerja belum sepenuhnya optimal. Aparatur cenderung telah memahami pentingnya kinerja dan hasil kerja, namun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan prosedural dan administratif yang menghambat fokus pada outcome. Temuan ini sejalan dengan karakteristik birokrasi publik yang masih menghadapi tantangan dalam menggeser orientasi kerja dari sekadar kepatuhan terhadap aturan menuju pencapaian kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Selanjutnya, dimensi orientasi pelayanan publik menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,2396, dengan standar deviasi 0,45294. Nilai ini menggambarkan bahwa aparatur Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki komitmen yang cukup kuat terhadap pelayanan publik. Orientasi pelayanan yang tinggi mencerminkan kesadaran aparatur bahwa tujuan utama birokrasi adalah memberikan layanan yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hasil ini juga mengindikasikan adanya pergeseran paradigma birokrasi dari pendekatan administratif ke arah pelayanan publik yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dimensi kerja sama dan kolaborasi memperoleh nilai rata-rata tertinggi dibandingkan dimensi lainnya, yaitu sebesar 4,3802, dengan standar deviasi 0,46873. Temuan ini menunjukkan bahwa budaya kerja sama dan kolaborasi antar aparatur relatif kuat. Aparatur menilai bahwa koordinasi, kerja tim, serta kolaborasi antar unit kerja dan antar individu telah berjalan dengan baik. Budaya kolaboratif ini menjadi modal penting dalam mendukung rekonstruksi birokrasi, terutama dalam konteks implementasi *Smart Government* yang menuntut integrasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah.

Sementara itu, dimensi adaptasi terhadap teknologi memiliki nilai rata-rata sebesar 4,3490, dengan standar deviasi 0,49799. Nilai ini menunjukkan bahwa

aparatur secara umum cukup adaptif terhadap penggunaan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi. Aparatur relatif mampu menyesuaikan diri dengan sistem digital, aplikasi pemerintahan, serta inovasi teknologi yang diterapkan dalam kerangka *Smart Government*. Namun demikian, standar deviasi yang mendekati 0,50 mengindikasikan adanya variasi persepsi responden, yang dapat mencerminkan perbedaan tingkat kemampuan, kebiasaan, atau intensitas pemanfaatan teknologi antar aparatur.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif variabel budaya organisasi menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memiliki budaya organisasi yang relatif kondusif dalam mendukung perubahan, inovasi, dan transformasi birokrasi. Budaya kolaborasi dan adaptasi teknologi menjadi kekuatan utama, sementara orientasi kinerja dan hasil masih memerlukan penguatan agar transformasi birokrasi tidak hanya bersifat struktural dan prosedural, tetapi juga menghasilkan kinerja yang efektif dan berdampak nyata bagi pelayanan publik. Temuan ini menjadi landasan penting dalam menjelaskan kuatnya pengaruh budaya organisasi terhadap rekonstruksi birokrasi sebagaimana ditunjukkan dalam hasil uji hipotesis penelitian.

Variabel Rekonstruksi Birokrasi

Variabel Rekonstruksi Birokrasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana proses pembaruan dan penataan birokrasi telah berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Rekonstruksi Birokrasi dipahami sebagai upaya transformasi menyeluruh yang mencakup aspek struktural, fungsional, prosedural, kultural, dan sumber daya manusia (SDM). Pengukuran variabel ini dilakukan terhadap 96 responden dengan menggunakan skala Likert 1–5, yang kemudian dianalisis melalui statistik deskriptif menggunakan SPSS versi 30.

Tabel 4. 3. Statistik Deskriptif Variabel Rekonstruksi Birokrasi Descriptive Statistics

| | N | Min | Max | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|------|------|--------|----------------|
| Struktural | 96 | 3,67 | 5,00 | 4,2257 | 0,41744 |
| Fungsional | 96 | 3,67 | 5,00 | 4,1528 | 0,39267 |
| Prosedural | 96 | 3,67 | 5,00 | 4,2743 | 0,44326 |
| Kultural | 96 | 3,00 | 5,00 | 4,3472 | 0,52072 |
| SDM | 96 | 3,00 | 5,00 | 4,3333 | 0,51640 |
| Valid N (listwise) | 96 | | | | |

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara umum persepsi responden terhadap rekonstruksi birokrasi berada pada kategori tinggi, yang tercermin dari nilai rata-rata seluruh dimensi yang berada di atas angka 4,00. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung homogen, sehingga mencerminkan keseragaman persepsi aparatur terhadap proses rekonstruksi birokrasi yang sedang berlangsung.

Dimensi struktural memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,2257, dengan nilai minimum 3,67, maksimum 5,00, dan standar deviasi 0,41744. Nilai ini menunjukkan bahwa aparatur menilai perubahan dan penataan struktur organisasi birokrasi telah

berjalan dengan cukup baik. Penyesuaian struktur organisasi, pembagian kewenangan, serta penataan unit kerja dinilai mampu mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan secara lebih efektif. Struktur birokrasi yang relatif ramping dan jelas dinilai berkontribusi dalam mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan koordinasi antar unit kerja.

Dimensi fungsional menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,1528, dengan standar deviasi 0,39267, yang merupakan nilai standar deviasi terendah di antara dimensi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap aspek fungsional birokrasi relatif paling konsisten. Aparatur menilai bahwa pembagian fungsi, tugas, dan peran dalam birokrasi telah berjalan cukup jelas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Meskipun demikian, nilai rata-rata yang sedikit lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya mengisyaratkan bahwa optimalisasi fungsi birokrasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan keselarasan antara tugas, kewenangan, dan kapasitas aparatur.

Selanjutnya, dimensi prosedural memiliki nilai rata-rata sebesar 4,2743, dengan standar deviasi 0,44326. Nilai ini menunjukkan bahwa penyederhanaan dan pembaruan prosedur kerja birokrasi telah dirasakan secara positif oleh aparatur. Prosedur pelayanan dan administrasi dinilai semakin jelas, lebih terstandar, serta mulai memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari prosedur yang kompleks dan berbelit menuju tata kelola birokrasi yang lebih efisien dan transparan, sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi dan penerapan *Smart Government*.

Dimensi kultural memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 4,3472, dengan standar deviasi 0,52072. Nilai ini mengindikasikan bahwa perubahan budaya kerja dalam birokrasi telah dirasakan cukup kuat oleh aparatur. Perubahan pola pikir, nilai kerja, serta sikap aparatur terhadap pelayanan publik, inovasi, dan kolaborasi dinilai semakin positif. Namun, standar deviasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dimensi lain menunjukkan adanya variasi persepsi responden, yang dapat mencerminkan perbedaan tingkat internalisasi budaya kerja baru di antara aparatur pada unit kerja yang berbeda.

Dimensi sumber daya manusia (SDM) juga menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi, yaitu sebesar 4,3333, dengan standar deviasi 0,51640. Hal ini menandakan bahwa aparatur menilai kualitas, kompetensi, dan profesionalisme SDM birokrasi telah mengalami peningkatan. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, serta pemanfaatan teknologi informasi dinilai berkontribusi dalam mendukung rekonstruksi birokrasi. Meski demikian, variasi jawaban responden menunjukkan bahwa penguatan kapasitas SDM masih perlu dilakukan secara lebih merata, terutama dalam menghadapi tuntutan transformasi digital dan inovasi pelayanan publik.

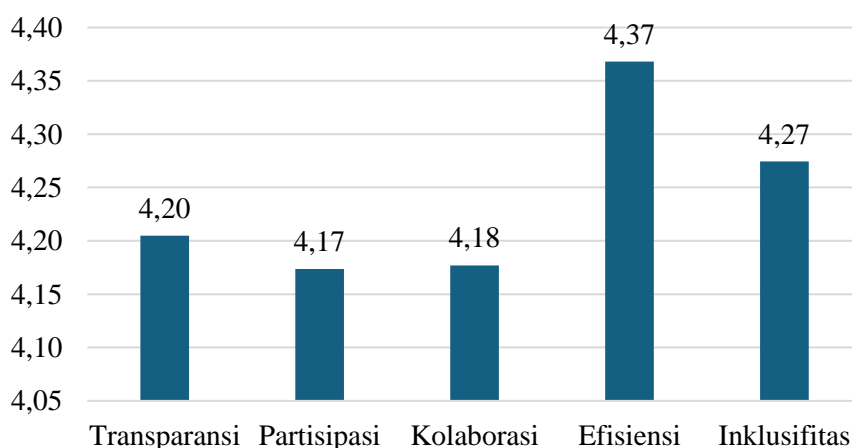
Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif variabel rekonstruksi birokrasi menunjukkan bahwa proses pembaruan birokrasi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah berjalan dalam arah yang positif. Dimensi kultural dan SDM menjadi aspek yang paling menonjol, sementara dimensi fungsional masih memerlukan penguatan agar seluruh elemen birokrasi dapat bekerja secara optimal dan selaras. Temuan ini mengindikasikan bahwa rekonstruksi birokrasi tidak hanya berlangsung pada aspek struktural dan prosedural, tetapi juga menyentuh perubahan nilai, perilaku, dan kapasitas aparatur sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 30, diperoleh nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,021. Nilai ini merupakan hasil uji *t* parsial yang ditunjukkan pada kolom “**Sig.**” dalam tabel *Coefficients*, yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Smart Government* berpengaruh secara signifikan terhadap Rekonstruksi Birokrasi. Selain itu, nilai *t* hitung sebesar 1,764 (berdasarkan output SPSS pada kolom “*t*”) juga lebih besar dibandingkan dengan nilai *t* tabel sebesar 1,291, yang semakin memperkuat bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, hasil uji parsial ini menunjukkan bahwa *Smart Government* memiliki pengaruh nyata terhadap Rekonstruksi Birokrasi, meskipun jika dibandingkan dengan variabel lainnya, tingkat pengaruhnya relatif lebih kecil.

Secara statistik, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pelaksanaan *Smart Government* yang mencakup unsur transparansi, partisipasi publik, kolaborasi antarlembaga, efisiensi proses, dan inklusivitas pelayanan yang secara nyata berkontribusi dalam menjelaskan variasi rekonstruksi birokrasi di pemerintahan daerah. Secara empiris, hasil ini memperkuat gagasan bahwa kebijakan teknologi pemerintahan tidak hanya bersifat instrumental tetapi juga substantif dalam mempercepat perubahan kelembagaan birokrasi.

Selain ditunjukkan oleh hasil uji statistik inferensial, pengaruh *Smart Government* terhadap rekonstruksi birokrasi di Kota Tangerang Selatan juga tercermin dari tingginya nilai rata-rata jawaban responden pada masing-masing dimensi *Smart Government*. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh dimensi *Smart Government* memiliki nilai mean di atas angka 4,00, yang mengindikasikan bahwa implementasi *Smart Government* dipersepsikan baik hingga sangat baik oleh aparaturnya pemerintah daerah.



Gambar 4. 1. Rata-rata Jawaban Responden Pada Variabel *Smart Government* per Dimensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi *Smart Government*, dimensi efisiensi menjadi aspek yang paling menonjol dengan nilai rata-rata tertinggi (4,37). Dominasi dimensi ini mengandung makna bahwa arah pengembangan *smart government* di Kota Tangerang Selatan masih berfokus pada upaya peningkatan

kinerja internal birokrasi, khususnya dalam hal percepatan layanan, penyederhanaan prosedur, dan optimalisasi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi pemerintahan telah berhasil dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperbaiki aspek operasional birokrasi. Teknologi digunakan untuk mengurangi waktu pelayanan, menekan biaya administrasi, serta meningkatkan ketepatan dan konsistensi proses kerja. Dengan kata lain, *smart government* telah berfungsi secara efektif sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi administratif, yang selama ini menjadi salah satu permasalahan klasik dalam birokrasi.

Namun demikian, jika dimaknai lebih dalam, dominasi efisiensi juga menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi masih berada pada tahap awal, yaitu pada level perbaikan prosedural (*process improvement*), dan belum sepenuhnya mengarah pada perubahan yang bersifat struktural maupun kultural. Efisiensi pada dasarnya hanya menyentuh “cara kerja” birokrasi, bukan “cara berpikir” maupun “cara berinteraksi” birokrasi dengan masyarakat.

Implikasinya, meskipun birokrasi menjadi lebih cepat dan praktis, hal tersebut belum tentu secara otomatis menghasilkan birokrasi yang lebih partisipatif, kolaboratif, atau adaptif. Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan bahwa *smart government* di Kota Tangerang Selatan telah berhasil menjawab persoalan efisiensi, tetapi masih memerlukan penguatan agar dapat berkontribusi lebih jauh pada rekonstruksi birokrasi yang bersifat mendasar.

Secara konseptual, kondisi ini mencerminkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam birokrasi masih diposisikan sebagai alat untuk *doing things better*, belum sepenuhnya sebagai sarana untuk *doing things differently*. Oleh karena itu, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan efisiensi, tetapi pada bagaimana *smart government* dapat mendorong perubahan yang lebih substantif dalam tata kelola pemerintahan.

Secara teoretis, hasil ini sejalan dengan pandangan Gil-Garcia et al. (2014) yang menyatakan bahwa *Smart Government* tidak hanya berfungsi sebagai pemanfaatan teknologi dalam administrasi publik, tetapi sebagai instrumen transformasi tata kelola yang mendorong transparansi, kolaborasi, partisipasi, efisiensi, dan integrasi layanan. Ketika dimensi-dimensi tersebut berjalan efektif, maka struktur dan prosedur birokrasi akan mengalami penyesuaian menuju model yang lebih adaptif dan responsif. Dengan demikian, signifikansi pengaruh *Smart Government* dalam penelitian ini memperkuat argumentasi teoritis bahwa transformasi digital berperan sebagai katalis perubahan organisasi publik.

Dari perspektif normatif, temuan ini juga selaras dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menegaskan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas sistem antar instansi pemerintah. Kedua regulasi tersebut secara eksplisit mengarahkan transformasi digital sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional.

Pada tingkat daerah, komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 108 Tahun 2018 tentang *Masterplan Smart City 2017–2027*, yang menempatkan *Smart Government* sebagai pilar utama dalam penguatan tata

kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi pemerintahan di Kota Tangerang Selatan telah bergerak ke arah yang sesuai dengan kerangka regulatif nasional dan daerah.

Namun demikian, meskipun berpengaruh signifikan, nilai t hitung yang tidak terlalu besar mengindikasikan bahwa pengaruh *Smart Government* terhadap rekonstruksi birokrasi belum sepenuhnya dominan. Hal ini dapat dimaknai bahwa transformasi digital saja belum cukup untuk menghasilkan perubahan birokrasi yang menyeluruh tanpa didukung oleh faktor lain, khususnya budaya organisasi dan kesiapan sumber daya manusia. Temuan ini juga sejalan dengan kondisi empiris yang teridentifikasi sebelumnya, yaitu belum optimalnya integrasi antar dinas dan pemanfaatan aplikasi oleh aparatur.

Secara substantif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Smart Government* di Kota Tangerang Selatan telah mendorong perubahan pada aspek prosedural dan struktural birokrasi, seperti penyederhanaan layanan, digitalisasi administrasi, serta peningkatan akses informasi publik. Namun perubahan tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek kultural dan integratif agar rekonstruksi birokrasi dapat berlangsung secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa *Smart Government* berperan sebagai faktor pendorong (*enabler*) dalam proses rekonstruksi birokrasi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan organisasi dan budaya kerja aparatur dalam menginternalisasi perubahan tersebut.

Lebih lanjut, temuan ini sejalan dengan literatur kontemporer yang menempatkan tata kelola digital sebagai konfigurasi strategi untuk memperkuat efektivitas dan responsivitas pemerintahan. Sebagai contoh, kajian sistematis terhadap literatur *Smart Governance* menekankan bahwa *Digital Governance* menjadi elemen penting dalam pemerintahan modern yang berfokus pada integrasi teknologi digital ke dalam praktik pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan partisipasi warga negara dalam proses kebijakan (Fitriani, 2025). Dalam tinjauan tersebut, *Smart Governance* dilihat sebagai suatu model tata kelola digital yang mencerminkan kemajuan teknologi pemerintahan sekaligus menghubungkan aspek teknis, regulatif, dan sosial dalam reformasi sektor publik.

Selain itu, studi empiris lain juga memaparkan bahwa implementasi *Smart Governance* pada tingkat lokal dapat meningkatkan responsivitas birokrasi dengan cara memperluas penggunaan platform digital untuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Analisis di Surabaya menunjukkan bahwa indikator transparansi, kolaborasi digital, dan adaptasi kelembagaan terhadap tuntutan masyarakat memperkuat kapasitas pemerintahan dalam merespons kebutuhan warga secara cepat dan akuntabel. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa *Smart Government* cukup relevan dalam memfasilitasi rekonstruksi birokrasi, khususnya ketika dikaitkan dengan responsivitas dan keterlibatan publik.

Studi lain yang relevan menunjukkan hubungan kuat antara digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan efektivitas birokrasi melalui kerangka *e-Government* dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Penelitian ini mencatat bahwa integrasi teknologi digital tidak hanya mendukung transparansi dan efisiensi administratif, tetapi juga membantu memperkuat koordinasi antar unit kerja, sehingga proses birokrasi menjadi lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Temuan ini konsisten dengan hasil empiris yang menunjukkan bahwa

Smart Government berkontribusi terhadap rekonstruksi birokrasi melalui mekanisme digitalisasi layanan dan integrasi sistem pemerintahan.

Secara teoritis, pengaruh *Smart Government* terhadap rekonstruksi birokrasi dapat dipahami melalui pendekatan *Digital Governance Theory*, yang menekankan posisi teknologi digital tidak hanya sebagai alat fungsional, tetapi sebagai pendorong perubahan kelembagaan yang lebih dalam. *Digital Governance Theory* berargumen bahwa transformasi digital dalam administrasi publik menghadirkan lingkungan baru bagi praktik pemerintahan yang memadukan kemampuan teknologi dengan kebutuhan adaptif organisasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif. Transformasi semacam ini mendorong birokrasi untuk keluar dari pola administratif tradisional dan bergerak menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap tuntutan masyarakat modern.

Dalam hal ini, *Smart Government* dapat dipandang sebagai *socio-technical innovation*, sebuah inovasi yang melibatkan interaksi antara aspek teknis (teknologi digital) dan aspek organisasi (budaya, struktur, dan proses kerja). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan kontemporer dalam literatur sektor publik yang menyarankan bahwa teknologi digital tidak berlaku sebagai solusi tunggal yang otomatis memperbaiki birokrasi, melainkan efektif ketika diadopsi secara strategis bersama dengan perubahan pada struktur organisasi dan proses kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *Smart Government* membawa potensi besar untuk mendorong rekonstruksi birokrasi, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana teknologi tersebut diintegrasikan ke dalam praktik kerja aparatur dan sistem administrasi secara keseluruhan.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan konteks digitalisasi birokrasi di Indonesia secara lebih luas. Indikator global menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan peringkat dalam survei *e-Government United Nations*, yang mencerminkan kemajuan SPBE dalam sistem pemerintahan nasional. Peningkatan peringkat ini menunjukkan perkembangan komitmen pemerintah terhadap optimalisasi layanan digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi, yang sejalan dengan temuan penelitian bahwa *Smart Government* memiliki peranan penting dalam mendorong rekonstruksi birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel.

Dalam konteks kebijakan local, hasil penelitian ini menyarankan bahwa pemanfaatan *Smart Government* harus dilihat tidak hanya sebagai pengembangan digital semata, tetapi sebagai strategi transformasi kelembagaan yang membutuhkan komitmen terus-menerus dari seluruh tingkat birokrasi. Penerapan *Smart Government* bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan praktik kerja, struktur proses layanan, dan pola interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa *Smart Government* bukan hanya memodernisasi teknologi pemerintahan, tetapi juga semakin memperluas ruang partisipasi publik, meningkatkan transparansi informasi, dan memperkuat akuntabilitas birokrasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa *Smart Government* memiliki kontribusi signifikan terhadap rekonstruksi birokrasi di Kota Tangerang Selatan dengan dukungan bukti empiris dan teori kontemporer. Temuan ini memberikan dukungan kuat bagi gagasan bahwa integrasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan lokal bukan hanya relevan dalam konteks teknis, tetapi juga sebagai bagian dari strategi reformasi birokrasi yang lebih luas dan berkelanjutan.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama terkait pengaruh *Smart Government* dan Budaya Organisasi terhadap Rekonstruksi Birokrasi di Kota Tangerang Selatan; 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Smart Government* berpengaruh signifikan terhadap rekonstruksi birokrasi di Kota Tangerang Selatan. Temuan ini dibuktikan melalui uji t (parsial) yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 serta nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel. Secara empiris, hal ini menegaskan bahwa penerapan *Smart Government* yang mencakup transparansi, partisipasi, kolaborasi, efisiensi, dan inklusivitas berkontribusi dalam mendorong perubahan tata kelola birokrasi ke arah yang lebih modern, responsif, dan berbasis teknologi. *Smart Government* berperan sebagai instrumen strategis dalam menyederhanakan proses birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan; 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya Organisasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan dominan terhadap rekonstruksi birokrasi di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 dan nilai t hitung yang jauh lebih besar dibandingkan t tabel. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai, norma, sikap, dan pola perilaku aparatur birokrasi merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan rekonstruksi birokrasi. Budaya organisasi yang adaptif, profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada kinerja terbukti mampu mendorong perubahan birokrasi secara lebih mendalam dan berkelanjutan dibandingkan perubahan yang hanya bersifat struktural atau teknologis; 3) Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa *Smart Government* dan Budaya Organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap rekonstruksi birokrasi di Kota Tangerang Selatan. Nilai signifikansi uji F yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai F hitung yang jauh lebih besar dibandingkan F tabel menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan proses rekonstruksi birokrasi. Selain itu, nilai Adjusted R² sebesar 0,762 menunjukkan bahwa 76,2% variasi rekonstruksi birokrasi dapat dijelaskan oleh kombinasi *Smart Government* dan budaya organisasi, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anderson, J. E. (2006). *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Andini, F. S., Suherman, A., & Utami, P. (2023). Implementasi Strategi Electronic Government dalam Mewujudkan Tata Kelola Cerdas di Kota Tangerang. *Multilingual: Journal of Universal Studies* [Online], 3(4), 24–38.
- Aufar Azmi, I., Djunaedi, A., & Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. (2022). Kajian Pengaruh *Smart City* DKI Jakarta terhadap Perkembangan *Smart City* Tangerang Selatan. *Jurnal Riset Pembangunan* [Online], 4(2), 75–85. Tersedia: <https://doi.org/10.36087/JRP.V4I2.100> [diakses tanggal 12 Desember 2025].
- Bakici, T., Almirall, E., & Wareham, J. (2013). A *Smart City* Initiative: The Case of Barcelona. *Journal of the Knowledge Economy* [Online], 4(2), 135–148.
- Kansil, C. S. T., dkk. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Caiden, G. E. (1991). *Administrative Reform Comes of Age*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2019). *Diagnosing and Changing Organizational Culture*. Hoboken: Wiley.
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. Dalam G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern Methods for Business Research*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 295–336.
- Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T. A., & Scholl, H. J. (2012). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. Dalam *Proceedings of the 45th Hawaii International Conference on System Sciences* [Online], 2289–2297.
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). *Transcending New Public Management: The Transformation of Public Sector Reforms*. Aldershot: Ashgate.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill Education.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denison, D. R. (1990). *Corporate Culture and Organizational Effectiveness*. New York: John Wiley & Sons.
- Denison, D. R., Haaland, S., & Goelzer, P. (2004). Corporate culture and organizational effectiveness: Is Asia different from the rest of the world? *Organizational Dynamics* [Online], 33(1), 98–109.
- Duchek, S. (2020). Organizational resilience: A capability-based conceptualization. *Business Research* [Online], 13(1), 215–246.
- Dunleavy, P., & Margetts, H. (2021). *Digital Era Governance: New Perspectives*. Oxford: Oxford University Press.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fadia, M. N., Rahmawati, N. D., Fadhila, S. N., Sabrina, S., & Adinda, V. M. (2023). Dampak Sosial-Ekonomi Penerapan *Smart City* untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Semarang. *Swatantra* [Online], XXI(2), 117–126.
- Fitriani. (2025). Smart Governance for Smart Societies: A Narrative Review of Digital Models. *Politeia*.
- Fukuyama, F. (2014). *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- García, M. (2021). The Role of *Smart City* Initiatives in Enhancing Urban Governance: A Case Study of Barcelona. *Urban Studies Journal* [Online], 17(1), 78–102.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giffinger, R., et al. (2007). *Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities*. Vienna: Centre of Regional Science.
- Gil-Garcia, J. R., Helbig, N., & Ojo, A. (2014). Being smart: Emerging technologies and innovation in the public sector. *Government Information Quarterly* [Online], 31(Supplement 1), I1–I8.

- Hasibuan, N. H. (2024). *Tata Kelola Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi (Studi UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara)*.
- Hidayat, T., & Kurniawan, M. (2022). *Learning culture in public bureaucracy: Drivers and outcomes*. *Journal of Governance Studies* [Online], 4(3), 122–136.
- Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and Organizations: Software of the Mind* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Kim, S. Y. (2019). *Smart City Development in Seoul: Integrating ICT for Sustainable Urban Management*. *Journal of Sustainable Urban Development* [Online], 14(2), 34–56.
- Lee, A. (2020). *Smart City Initiatives in Surabaya: Enhancing Public Accountability and Transparency*. *International Journal of Public Administration* [Online], 15(4), 98–120.
- Lopez, A., & Aquino, R. (2021). Organizational culture and performance in public organizations: Empirical evidence from local governments. *Public Administration Review* [Online], 81(4), 745–758.
- Luna-Reyes, L. F., Gil-Garcia, J. R., & Mellouli, S. (2021). Digital government transformation and public sector innovation. *Public Management Review* [Online], 23(8), 545–555.
- Meitibellina, N., & Hariyanti, P. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Blora Menuju *Smart City*. *Jurnal Komunikasi* [Online], 15(1), 59–74. Tersedia: <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol15.iss1.art5> [diakses tanggal 10 November 2025].
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2020). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly* [Online], 37(1).
- Nugroho, H., & Setiawan, A. (2019). Hambatan Implementasi *Smart City* dalam Reformasi Birokrasi: Studi Kasus Jakarta *Smart City*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* [Online], 7(2), 88–104.
- Nurmi Chatim. (2006). *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Cendikia Insani.
- Pemerintah Kota Tangerang Selatan. (2022). *Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021–2026*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*.
- Peters, B. G. (2010). *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration*. London: Routledge.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Pratama, A., & Suharto, D. (2022). Organizational readiness and bureaucratic reform in local government digitalization. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* [Online], 9(2).
- Presiden Republik Indonesia. (2010). *Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2025*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Putri, A., & Santoso, B. (2024). Bureaucratic culture and internal reform: A study of local government administrative change. *Indonesian Journal of Public Management* [Online], 7(2), 89–105.

- Rahmawati, N. (2023). *Dampak Sosial-Ekonomi Penerapan Smart City untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Semarang*.
- Raidipa Wisesa, A., Isroyanti, Y., Anggarani, R., & Prasasti, N. (2023). Perkembangan Konsep *Smart City* dalam Momentum Reformasi Birokrasi: Studi pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. *Vol. XXI(2)*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Boston: Pearson.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Scott, W. R. (2021). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sedarmayanti. (2018). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Smith, J. (2018). Implementasi *Smart City* di Kota Bandung: Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik. *Journal of Urban Development* [Online], 12(3), 45–67.
- Suhendra, E., & Santoso, H. B. (2017). *Smart City: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Bandung*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* [Online], 3(2), 115–130.
- Tan, W. (2022). Smart Nation Initiative in Singapore: A Model for Urban Innovation. *Journal of Urban Technology* [Online], 20(3), 112–136.
- Thoha, M. (2012). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Boston: Pearson Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press.
- Wibowo. (2016). *Budaya Organisasi: Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wijaya, I., et al. (2023). Cultural determinants of bureaucratic innovation: Evidence from Indonesian local government. *Journal of Public Administration* [Online], 12(1), 56–72.
- Winarno, A., & Dewi, R. (2018). Efektivitas Implementasi *Smart City* dalam Mendukung Reformasi Birokrasi di Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik* [Online], 5(1), 45–60.
- Wisesa, A. R., Isroyanti, Y., Anggarani, R., & Prasasti, N. (2023). Perkembangan Konsep *Smart City* dalam Momentum Reformasi Birokrasi: Studi pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. *Swatantra* [Online], XXI(2), 117–126.
- Zhang, T., & Lee, J. (2022). Organizational culture and public sector innovation: A cross-national study. *Governance and Public Policy* [Online], 14(2), 211–230.